

ABSTRAK

Nama : Budi Setiawan
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Evaluasi Perbandingan Penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 Terhadap Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta)

Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran *capital charge* yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 harus dievaluasi dampaknya terhadap rasio KPMM.

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah BI telah menerapkan prinsip keadilan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dengan melakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua PBI tersebut. Data yang digunakan merupakan data publikasi triwulanan tahun 2006 dan 2007 Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Uji hipotesis dengan metode *compare mean independent samples t-test*. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta dari hasil uji hipotesis ditemukan terdapat perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM diantara kedua PBI tersebut. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam perhitungan KPMM.

Kata kunci:
KPMM, PBI No. 5/12/PBI/2003, PBI No. 8/7/PBI/2006, *t-test*.

ABSTRACT

Name : Budi Setiawan
Study Program: Middle East and Islamic Studies
Title : Comparative Evaluation in Implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the Capital Adequacy Ratio (Case Study at Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta)

One of the aspects that can be used as a standard reference of selecting Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation approach is the one that creates lower capital charge measurement so that the CAR becomes higher. The impact of PBI No. 8/7/PBI/2006 publication on CAR has to be evaluated.

This research evaluates whether BI has implemented fairness principles in the publication of PBI No. 8/7/PBI/2006, which is by performing comparison in the implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the CAR of *Bank Syariah Mega Indonesia* and *Bank Jasa Jakarta*. This research is aimed to evaluate differences between two CAR calculation in two Bank Indonesia Regulations (PBI). Data used in this research are the quarterly data published by Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta in 2006 and 2007. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis. The result of this research show that there is no difference in the CAR calculation between PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 at *Bank Syariah Mega Indonesia* while there is difference in the calculation of KPMM ratio between the two PBI at *Bank Jasa Jakarta*. PBI No. 8/7/PBI/2006 has implemented fairness values in calculating KPMM.

Keywords:
Capital Adequacy Ratio (CAR), *PBI No. 5/12/PBI/2003*, *PBI No. 8/7/PBI/2006*, t-test.

الخلاصة

اسم : بودي سيتياوان
بارنامج دراسي : دراسة ولاية الشرق الأوسط والإسلام
موضوع : اختبار المقارنة بين تطبيق نظام بنك إندونيسيا رقم 2003/12/5 ونظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8 و((مستوى إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال))
(الدراسة الواقعية في بنك ميغا إندونيسيا الإسلامي وبنك جاسا جاكرتا)

إحدى العوامل وراء استخدام طريقة إحصاء مستقلة ((إم إيج ماد الحد الأدنى للرأسمال)) لتخدام الطريقة التي تتج الم مستوى الأدنى للرأسمال الاحتياطي من الم مستوى السابق، ويترتب من ذلك ظهور الم مستوى الأعلى لـ ((إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال)) ويلزم من صدور نظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8 اختبار أثره على مستوى ((إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال)). ويحازل هذا البحث على الاختبار هل طبق البنك الإندونيسي منهج العدالة في إصدار نظام بنك إندونيسيا رقم 2003/12/5 ونظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8 على مستوى ((إم إيج ماد الحد الأدنى للرأسمال)) بنك ميغا إندونيسيا الإسلامي وبنك جاسا جاكرتا من هذا البحث والاختبار هل توجد فروق نتائج إحصاء مستوى ((إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال)) بين نظامي بنك إندونيسيا، والملفات المستخدمة هي الملفات الثلاثة الأشهرية التي أصدرها بنك ميغا إندونيسيا الإسلامي وبنك جاسا جاكرتا، ويستخدم البحث قاعدة (compare mean independent samples t-test) ويظهر من نتائج البحث والدراسة عليه عدم وجود فروق نتائج إحصاء مستوى ((إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال)) في بنك ميغا إندونيسيا الإسلامي في تطبيق نظام بنك إندونيسيا رقم 2003/12/5 ونظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8 أما في بنك جاسا جاكرتا فلا يوجد فروق بين تطبيق نظامي بنك إندونيسيا وقد طبق نظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8 منهج العدالة في حساب ((مستوى إلزام إيجاد الحد الأدنى للرأسمال)).

مفتاح الكلمة: ((إم إيج ماد الحد الأدنى للرأسمال)) نظام بنك إندونيسيا

رقم 2003/12/5، نظام بنك إندونيسيا رقم 2006/7/8، (t-test)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank dan akan menciptakan dampak ikutan secara domestik maupun pasar internasional.

Pentingnya peranan bank dalam melaksanakan fungsinya maka perbankan perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat dari aktivitas perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank adalah kecukupan permodalan. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawasan bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, risiko operasional.

Peraturan harus memberikan unsur keadilan terhadap penggunanya. BI dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut pada setiap peraturan yang diterbitkan. Evaluasi keefektifan atas terbitnya sebuah peraturan/kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 merupakan sebuah solusi atas pengukuran KPMM perbankan syariah yang selama ini masih menggunakan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003. Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran *capital charge* yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi.

Dari ketiga Bank Umum Syariah yang ada, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 berdampak positif terhadap Bank Syariah Mandiri dan bank Muamalat dilihat dari

rata-rata rasio KPMM yang ada setelah penerapan peraturan tersebut pada triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 sebesar 13,69% dibandingkan dengan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 yang sebesar 13,22%. Berbeda dengan kedua bank tersebut, di Bank Syariah Mega Indonesia terjadi hal yang sebaliknya setelah penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006.

Bank Syariah Mega Indonesia menggunakan PBI No. 5/12/PBI/2003 untuk mengukur Rasio KPMM-nya sampai dengan triwulan keempat tahun 2005, setelah terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 pada bulan Februari 2006 maka perhitungan rasio KPMM di triwulan pertama tahun 2006 telah mengikuti aturan ini.

Data yang didapatkan dari Bank Syariah Mega Indonesia diketahui bahwa pada triwulan keempat 2004 sampai dengan triwulan keempat 2005 rata-rata persentase *Non Performance Financing* (NPF) sebesar 1,76% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata persentase NPF dari tahun 2006 sampai dengan 2007 sebesar 1,22%. Sedangkan *capital charge* yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kredit semakin besar dari rata-rata Rp 404,032 juta sebelum tahun 2006 dan meningkat menjadi Rp 1.495,473 juta. Hal ini berakibat pada penurunan rasio rata-rata KPMM menjadi 9,58% dari 2006 sampai dengan triwulan ketiga 2007 dibandingkan rata-rata Rasio KPMM pada tahun 2005 yang sebesar 18,36%. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran rasio KPMM dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006, yaitu penurunan rata-rata Rasio KPMM dari 18,36% menjadi 9,58%. Untuk melakukan uji perbandingan maka dilakukan penerapan PBI 8/7/PBI/2006 terhadap Bank Konvensional Non Devisa yang mempunyai skala yang sama dengan Bank Syariah Mega Indonesia. Setelah melakukan studi awal maka dipilih Bank Jasa Jakarta sebagai bank pembanding. Seandainya PBI No. 8/7/PBI/2006 diterapkan pada Bank Jasa Jakarta apakah akan terjadi penurunan rasio KPMM atau tidak.

Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua

PBI tersebut dan memberikan solusi untuk peningkatan rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia atas penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis awal yang akan diajukan adalah tidak terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003 dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan Rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta antara perhitungan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah status Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta yang merupakan Bank Umum Non Devisa, sehingga tidak terkena risiko pasar sesuai dengan PBI No. 7/13/PBI/2005 yang menyebutkan bahwa risiko pasar (*risk market*) yang dimaksud dalam PBI ini ialah risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*). Sehingga pembagi dalam rumus perhitungan KPMM-nya hanya terbatas kepada *capital charge* yang dibutuhkan untuk risiko pembiayaan saja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang dibuat dan dilaporkan secara triwulanan untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara internal (perusahaan) maupun eksternal (BI, Kantor Akuntan Publik dan lain sebagainya). Data yang digunakan berasal dari laporan Neraca, Laporan Perhitungan KPMM, Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya, Laporan Komitmen dan Kontijensi. Data yang digunakan merupakan data Triwulanan tahun 2006 dan tahun 2007.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Triwulanan Bank Umum Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta dalam situs www.megasyariah.co.id, www.jasajakarta.co.id, dan www.bi.go.id, untuk laporan keuangan triwulanan yang disediakan mulai triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007.

Metode perhitungan dan analisis data yang diambil dari laporan keuangan Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta diolah melalui lima tahapan, yaitu pengelompokkan data, kemudian perhitungan permodalan, perhitungan ATMR, perhitungan KPMM dan uji hipotesis. Perhitungan dilakukan menurut

PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006 hasil perhitungan kedua PBI tersebut yang berupa KPMM kemudian diuji dengan *compare mean independent samples t-test* untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua hasil perhitungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Perhitungan menurut PBI No.. 8/7/PBI/2006 menghasilkan rata-rata rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 sebesar 10,14% dan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebesar 21,14%
2. Perhitungan dengan pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003 menghasilkan rata-rata rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan triwulan keempat tahun 2007 sebesar 9,17% dan Rasio KPMM Bank Jasa Jakarta dari triwulan pertama tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebesar 19,67%
3. Menurut uji *compare mean independent samples t-test* ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio KPMM Bank Syariah Mega Indonesia menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta setelah dilakukan pengujian dengan metode yang sama ditemukan bahwa ada perbedaan rata-rata rasio KPMM menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan PBI No. 5/12/PBI/2003.
4. Dengan adanya penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 maka Bank Syariah Mega Indonesia dapat meningkatkan KPMM-nya dengan melakukan dua skenario. Skenario 1 (satu) yaitu dengan mengalihkan kepemilikan surat berharga ke perusahaan yang mempunyai rating A+ s.d. A- dengan bobot risiko 50% dan penyaluran dana ke korporasi yang mempunyai A+ s.d. A- dengan bobot risiko 50% maka KPMM akan naik dari 12,91% menjadi 14,49%. Sedangkan dengan melakukan skenario 2 (dua) yaitu dengan pengalihan kepemilikan surat berharga ke perusahaan yang mempunyai rating AAA s.d. AA- dengan bobot risiko 20% dan penyaluran dana kepada sektor korporasi yang

mempunyai rating AAA s.d. AA- dengan bobot risiko 20% maka KPMM akan meningkat dari 12,91% menjadi 16,65%.

5. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan yaitu dengan memberikan kesempatan bagi perbankan syariah untuk mendapatkan insentif dalam pengurangan *capital charge* dan meningkatkan KPMM-nya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil perhitungan rasio KPMM menurut pendekatan PBI No. 8/7/PBI/2006 yang selalu berada di atas rata-rata rasio KPMM menurut pendekatan PBI No. 5/12/PBI/2003.

Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan Bank Syariah Mega Indonesia secara bertahap dapat memilih penempatan komponen surat berharga dan penyaluran dana untuk sektor korporasi kepada perusahaan yang mempunyai rating A- s.d. AAA agar mendapatkan insentif atas penerapan PBI No. 8/7/PBI/2006 dengan kenaikan rasio KPMM dari 12,91% menjadi 14,94% dengan melakukan skenario 1 (satu) atau naik menjadi 16,65% dengan melakukan skenario 2 (dua).